

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu peranan dalam pembangunan nasional dengan tujuannya yaitu supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Wilujeng, 2022). Menurut penelitian Pradnyani (2019), (Subehi *et al.*, 2020), dan (Putri *et al.*, 2022) Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi makmur dimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, kesehatan, dan pendidikan yang baik dan layak .

Pencapaian pembangunan ekonomi menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah salah satu lembaga utama pemerintah yang bisa menjangkau kelompok sasaran nyata yang akan disejahterakan. Desa mempunyai potensi bukan hanya dari penduduk saja melainkan dari sumber daya alam yang ada. Pembangunan basis ekonomi perdesaan diupayakan oleh pemerintah dengan melalui berbagai program (Prasetyo, 2017). Pembangunan ekonomi yang berkeadilan menjadi harapan seluruh negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, agar bisa mewujudkan hal tersebut, amak harus dimulai dengan pembangunan wilayah terkecil dan penguatan wilayah dalam kerangka kesatuan pemeritahan. Penguatan wilayah terkecil yaitu pedesaan kini menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantiknya akan membina dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki (Sidik, 2015).

Pembangunan wilayah pedesaan menjadi prirotas yang harus diperhatikan sebab desa merupakan unit terkecil yang ada pertimbangandalam identifikasi masalah. Tingkat kebutuhan masyarakat unutm perencanaan dan pelaksanaan tujuan negara, dimuali dari tingkat desa. Walaupun desa adalah unit terkecil dari

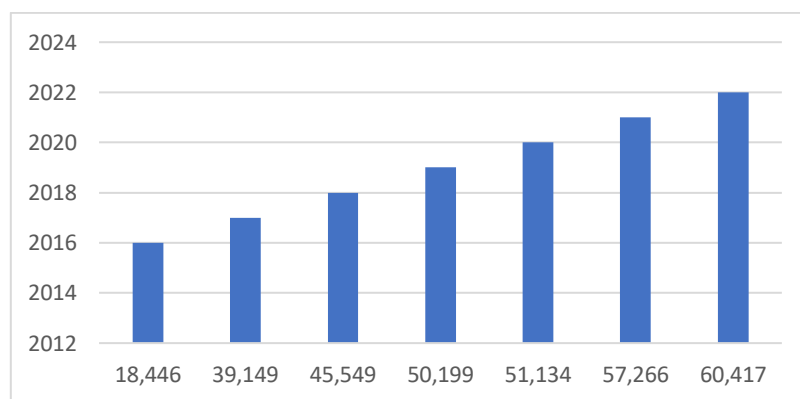
pembangunan wilayah suatu negara akan tetapi peranannya sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, desa harus didorong sepenuhnya untuk memaksimalkan potensi alam yang dimiliki (Triyanto, 2018). Hal ini menjadikan desa mempunyai kedudukan yang sah dalam menguatkan perekonomian, dan juga bisa meminimalisir ketimpangan sosial.

Peran pemerintah adalah mengembangkan daerah pedesaan mencapai pemberdayaan masyarakat melalui peningkatkan produktivitas dan inovasi bisnis dan ketersediaan fasilitas serta kawasan yang mendukung perekonomian berdasarkan pengembangan wilayah pedesaan dan mengoptimalkan sumber daya. Pemerintah memperkuat perangkat pembangunan yang ditargetkan melalui melalui dana desa yang terima dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber pendapatan utama desa (PADes) (Hermawan, 2015).

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang diharapkan bisa menyusun strategi yang tepat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program desa. Upaya yang dilakukan untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu berfokus pada pengelolaan potensi lokal (Pradani, 2020). Pemerintah Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan penyelenggara urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga diberikan kesempatan seluasluasnya untuk mengurus tata pemerintahan pelaksanaan pembangunan ekonomi guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kushartono (2016) menjelaskan bahwasanya untuk mendorong pembangunan di tingkat desa ada salah satu cara dengan memberikan kewenangan pada pemerintah desa

untuk bisa mengelola desa secara mandiri dengan melalui lembaga ekonomi tingkat desa. Lembaga ekonomi tingkat desa salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha milik desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dan berlandaskan pada hukum yang berlaku yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes sebagai instansi resmi yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat (Yulistiyono & Akbar, 2022). Untuk bisa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, maka dari itu BUMDes menjadi wadah untuk perangkat desa dan masyarakat secara tidak langsung bisa memberdayakan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kushartono, 2016).



Sumber : Sid Kemendes

Gambar 1. 1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwasanya pada tahun 2022, jumlah BUMDes yang sudah terbentuk mencapai 60,417 BUMDes. Dilihat dari diagram diatas menunjukkan bahwasanya setiap tahun BUMDes di Indonesia mengalami peningkatan, yang artinya bahwasanya sudah banyak desa di Indonesia yang

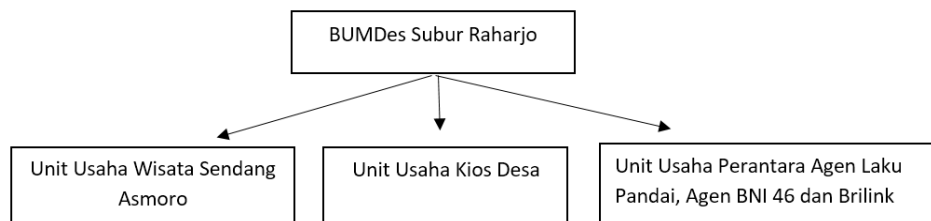
mendirikan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khairani & Yulistiyono, 2023), (Gayo et al., 2020), (Sinollah et al., 2018), Riyanti & Adinugraha (2021), (Pradnyani, 2019) dan (Firdaus, 2020) adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu berperan untuk meningkatkan perekonomian desa, masyarakat dan meningkatkan pengelolaan potensi lokal desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menjadi tulang punggung pemerataan, menstimulasi dan penggerak dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Berbeda dengan penelitian (Eikman & Vinuzia, 2020), (Selfianur & Ballutaris, 2021), yang menyatakan bahwasanya BUMDes belum cukup berperan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena ada beberapa faktor diantaranya yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya ketersediaan anggaran BUMDes.

Kabupaten Tuban memiliki jumlah Desa sebanyak 311 dengan Jumlah BUMDes Kabupaten Tuban sebanyak 107 aktif. BUMDes yang sudah terverifikasi sebanyak 67 BUMDes, dan BUMDes yang sudah berbadan hukum sebanyak 28 sedangkan BUMDes yang dalam perbaikan sebanyak 12. Termasuk BUMDes Subur Raharjo Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban termasuk BUMDes yang sudah aktif dan terverifikasi.

Desa Ngino merupakan desa prioritas yang berada di Kecamatan Semanding dengan potensi destinasi wisata yang ada. Wisata Sendang Asmoro juga telah mengikuti kompetensi wisata unggulan Jawa Timur dan Nasional. Wisata alam dengan konsep edukasi dan ramah anak itu dikembangkan terus untuk bisa memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan para wisatawan. Wisata Sendang Asmoro juga juga satu satunya peserta destinasi wisata yang mengikuti

Bursa Pariwisata Jawa Timur di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya (Website Resmi Pemerintah Desa Ngino, 2021). Adanya potensi yang dimiliki Desa Ngino dan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa Ngino yaitu “ Menjadi Desa Wisata Tingkat Nasional dan Desa Digital demi Terciptanya Desa Ngino yang Sejahtera, Maju, dan Bahagia”. Dari potensi yang telah dimiliki oleh Desa Ngino tersebut maka pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dirasa sangat tepat yang diberi nama BUMDes Subur Raharjo.



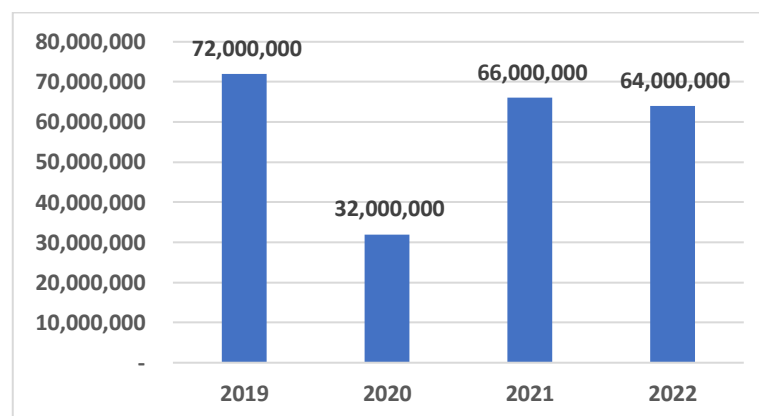
Sumber : Pemerintah Desa Ngino, (2023)

Gambar 1. 2 Unit Usaha BUMDes Subur Raharjo

Pada Gambar 1.4 BUMDes yang diberi nama BUMDes Subur Raharjo adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngino yang berdiri sejak tahun 2017. BUMDes Subur Raharjo ini mengelola 3 unit usaha yaitu: Desa Wisata Sendang Amoro, Agen BNI 46, Agen Laku Pandai, dan Persewaan Kios Desa. BUMDes Subur Raharjo pada Desa Wisata yaitu mengelolah Wisata Sendang Asmoro yang merupakan penopang BUMDes Subur Raharjo. Agen BNI 46, Agen Laku Pandai dan BRILINK merupakan unit usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan pembayaran pajak kendaraan, PDAM, rekening listrik, sedangkan untuk Persewaan Kios Desa merupakan stand kios yang disewakan guna untuk mengembangkan usaha masyarakat Desa Ngino yang bersekala mikro dalam pembuatan dan penjualan produk lokal.

BUMDes Subur Raharjo juga telah berpartisipasi terhadap Desa Ngino dengan meraih 40 besar Desa Briliian dengan urutan no 12 Brillian se-Indonesia

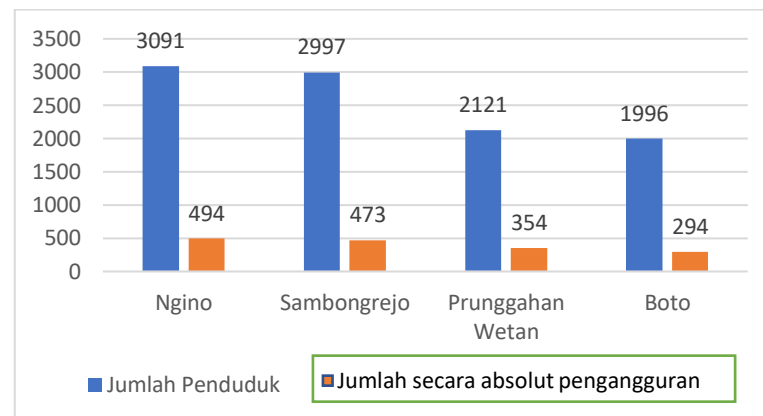
pada tahun 2022. Program Desa Brilliant merupakan sebuah desa binaan dari BRI yang mempunyai kombinasi dari empat aspek yaitu BUMDes yang aktif sebagai penggerak ekonomi desa, digitalisasi yang terimplementasi pada Desa Ngino yang aktif menggunakan produk BRI yaitu (BRILink, Web Pasar, Stroberi), dan aspek inovasi dimana sebagai desa yang kreatif untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dan sosial desa (Website Resmi Pemerintah Desa Ngino, 2022).



Sumber : Website Resmi Pemerintah Desa Ngino (2022)

Gambar 1. 3 Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Ngino

Pada gambar 1.4 menunjukkan Pendapatan Asli Desa (PADes) ditahun 2019 sebesar Rp. 72.000.000,00, pada tahun 2020 sebesar Rp. 32.000.000,00 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 sebesar Rp. 66.000.000,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2020, akan tetapi di tahun 2022 mengalami penurunan lagi namun tidak begitu signifikan dengan jumlah PADes Rp. 64.200.000,00. BUMDes Subur Raharjo memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes Subur Raharjo tetap diposisikan sebagai lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa walaupun secara signifikan PADes belum dirasakan oleh masyarakat.



Sumber : Kecamatan Semanding Dalam Angka (2022)

Gambar 1. 4 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jumlah Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk menurut pekerjaan Kecamatan Semanding Dalam Angka Tahun 2022 jumlah secara absolut pengangguran desa ngino masih tergolong tinggi dibandingkan dengan desa lain yang berada di Kecamatan Semanding, maka dari itu guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Desa Ngino lebih mandiri lagi dalam memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, maka pengembangan BUMDes yang sukses dengan mengacu pada indikator peran keberhasilan BUMDes yaitu dalam peranan sosial, sebagai unit ekonomi dan secara politik guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Najib *et al.*, 2019).

Dilihat dari data pengangguran dan jumlah PADes tersebut mungkin peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat belum signifikan, dapat dilihat dari aspek kurangnya BUMDes dalam memberikan kesempatan kerja. Maka pemerintah desa harus mampu Pemerintah desa harus mampu mendukung dan membantu menghidupkan kembali BUMDes, juga menjajaki peluang lokal di desa menciptakan inovasi terkini untuk unit bisnis terkemuka. Dengan demikian, BUMDes harus mampu merencanakan prioritas program usaha yang dilaksanakannya, fokus utama pada potensi lokal desa agar program berhasil

Pelaksanaan selanjutnya dapat terstruktur, terarah dan dengan demikian mencapai tujuan diinginkan yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pembentukan BUMDes di daerah Masih banyak daerah pedesaan yang belum bisa dikelola dengan baik tenggat waktu Menurut (Endah, 2019), ada beberapa permasalahan umum yang timbul selama pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan BUMDes, badan usaha kurang tepat, keterbatasan dalam pengkajian potensi yang dijadikan sumber pendapatan desa dan masyarakat desa dan tidak dapat menetapkan prioritas ketika memutuskan transaksi yang akan dilakukan.

Mengingat Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban merupakan Desa Piroritas yang memiliki potensi destinasi wisata maka lalu berkembang ke kios desa dan agen pembayaran yang telah menyumbang PADes. Akan tetapi pada masa Pandemi Covid hingga saat ini PADes mengalami penurunan maka pemerintah Desa Ngino dan para stakeholder BUMDes khususnya untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan strategi-strategi yang lain untuk meningkatkan produktivitas BUMDes Subur Raharjo dalam meningkatkan PADes dan membuka lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Ngino.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Raharjo dengan judul “Analisis Stategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Raharjo dalam Peranan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban”.

1.2 Rumusan Masalah

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha Yng dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, maka dari itu BUMDes menjadi wadah untuk perangkat desa dan masyarakat secara tidak langsung bisa memberdayakan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan pada latar belakang terdapat masalah yang berkaitan dengan penelitian sehingga diidentifikasi melalui perumusan masalah yaitu bagaimana penyusunan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Subur Raharjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan mengenai prioritas pada BUMDes Subur Raharjo Desa Ngino, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penyusunan BUMDes Subur Raharjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngino.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan gagasan sebagai pengembangan ilmu ekonomi yang bisa memberikan manfaat literatur dalam jangka panjang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Raharjo supaya bisa bermanfaat dalam pemberdayaan untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Ngino Kec. Semanding Kab. Tuban.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penulis yaitu:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
2. Bagi Pemerintah atau instansi terkait, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan bahan informasi dan pengetahuan terkait dengan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program BUMDes.